



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 65 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 65**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 65 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN 2023**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

---

Pasca penetapan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Garut periode tahun 2019-2024, maka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan dengan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk perencanaan lima tahun kedepan. Disamping itu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (RENJA) untuk perencanaan satu tahun kedepan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) pada hakikatnya merupakan penjabaran dari RPJMD, RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan industri dan perdagangan selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Perindustrian



Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah untuk satu tahun kedepan. Selain daripada itu Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk satu tahun kedepan.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024, RKPD yang disusun digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun tema pembangunan pada tahun 2023 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 untuk sektor industri yaitu pada peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan serta pariwisata dan jasa produktif lainnya. Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Garut yang berkontribusi didalam mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing akan melakukan langkah-langkah strategis guna peningkatan pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal melalui peningkatan pertumbuhan industri dengan pemanfaatan bahan baku lokal dan peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2023 mendukung program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk keterkaitan dengan Rencana Kerja Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBN.

Penyusunan Renja PD dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi

evaluasi pencapaian target dan realisasi program/kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penelaahan program/Kegiatan usulan Masyarakat. Disamping itu pula dilakukan penelaahan terhadap Visi, Misi serta Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan tela'ahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, serta Rencana Tata Ruang Wilayah agar di dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona*

*Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun

- 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 adalah sebagai acuan serta arah kebijakan yang secara khusus akan dilaksanakan di Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2023.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pembangunan daerah Kabupaten Garut untuk satu tahun kedepan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN GARUT TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut tahun lalu dan Capaian Renstra;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut;
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran renja Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut
- 3.3. Program dan Kegiatan.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2023

## BAB V PENUTUP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN ENERGI**  
**DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut tahun lalu dan Capaian Renstra.**

Hasil Evaluasi pelaksanaan rencana kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut tahun 2021 serta capaian Renstra tahun berjalan yang mengacu pada APBD, adalah sebagai berikut :

**I. Pendapatan**

Target pendapatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut pada penyelenggaraan tahun 2021 sebesar Rp. **2.217.502.054,00** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **1.649.494.160,00** atau **74,39%**.

**II. Belanja**

Total alokasi belanja pada penyelenggaraan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **31.084.946.379,00** dan dapat direalisasikan sebesar : Rp. **29.757.112.994,00** atau **95,73%**.

Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 serta Rincian Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini.

*Tabel 2.1*

**REKAPITULASI REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URAIAN	Lokasi	Anggaran		
		Kecamatan	Pagu (Rp)	Realisasi	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>2.217.502.054</b>	<b>1.649.494.160</b>	<b>74,39</b>
<b>1</b>	<b>Retribusi Daerah</b>		<b>1.747.643.744</b>	<b>1.552.859.160</b>	<b>88,85</b>
<b>1.1</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>		<b>1.668.755.024</b>	<b>1.482.518.000</b>	<b>88,84</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>		<b>1.641.255.024</b>	<b>1.454.518.000</b>	<b>88,62</b>

1.1.1.1	Retribusi Pelataran		218.268.000	244.549.800	112,04
1.1.1.2	Retribusi Los		292.334.400	206.559.800	70,66
1.1.1.3	Retribusi Kios		1.130.652.624	1.003.408.400	88,75
<b>1.1.2</b>	<b>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</b>		<b>27.500.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>101,82</b>
1.1.2.1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya		27.500.000	28.000.000	101,82
<b>1.2</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		<b>78.888.720</b>	<b>70.341.160</b>	<b>89,17</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Retribusi Terminal</b>		<b>78.888.720</b>	<b>70.341.160</b>	<b>89,17</b>
1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal		78.888.720	70.341.160	89,17
<b>2</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>		<b>469.858.310</b>	<b>96.635.000</b>	<b>20,57</b>
<b>2.1</b>	<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>		<b>31.695.000</b>	<b>24.782.000</b>	<b>78,19</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Lainnya</b>		<b>31.695.000</b>	<b>24.782.000</b>	<b>78,19</b>
2.1.1.1	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain		31.695.000	24.782.000	78,19
<b>2.2</b>	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>		<b>438.163.310</b>	<b>71.853.000</b>	<b>16,40</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD</b>		<b>438.163.310</b>	<b>71.853.000</b>	<b>16,40</b>
2.2.1.1	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD		438.163.310	71.853.000	16,40
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>31.084.946.379</b>	<b>29.757.112.994</b>	<b>95,73</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>		<b>50.667.700</b>	<b>43.135.200</b>	<b>85,13</b>
<b>1.1</b>	<b>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>50.667.700</b>	<b>43.135.200</b>	<b>85,13</b>
1.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarang, Pasirwangi, Karangtengah, Pangatikan, Sukaesmi	50.667.700	43.135.200	85,13
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>7.590.209.500</b>	<b>7.453.406.350</b>	<b>98,20</b>
<b>2.1</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>		<b>7.590.209.500</b>	<b>7.453.406.350</b>	<b>98,20</b>
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kecamatan Cikajang, Leles Kabupaten Garut	7.590.209.500	7.453.406.350	98,20
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>1.064.999.800</b>	<b>957.388.400</b>	<b>89,90</b>
<b>3.1</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>1.064.999.800</b>	<b>957.388.400</b>	<b>89,90</b>
3.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Garut	99.999.900	88.099.700	88,10
3.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Ciwalen, Pakuwon Kec. Garut Kota	964.999.900	869.288.700	90,08

<b>4</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>70.949.300</b>	<b>70.949.300</b>	<b>100,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota</b>		<b>70.949.300</b>	<b>70.949.300</b>	<b>100,00</b>
4.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kecamatan Tarogong Kidul, Kadungora, Cikajang, Pameungpeuk, Samarang, Malangbong Kabupaten Garut	62.844.300	62.844.300	100,00
4.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan PasarKhusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Cigedug, Cisurupan, Tarogong Kidul, Cilawu, Banyuresmi, Karangpawitan, Karangtengah, Sucinaraja, Pasirwangi	8.105.000	8.105.000	100,00
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>290.000.000</b>	<b>289.659.400</b>	<b>99,88</b>
<b>5.1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>290.000.000</b>	<b>289.659.400</b>	<b>99,88</b>
5.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	40.000.000	40.000.000	100,00
5.1.2	Pameran Dagang Lokal	Bandung, Jakarta, Kab. Garut	250.000.000	249.659.400	99,86
<b>6</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>211.401.600</b>	<b>210.565.650</b>	<b>99,60</b>
<b>6.1</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>		<b>211.401.600</b>	<b>210.565.650</b>	<b>99,60</b>
6.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Garut	169.999.700	169.163.750	99,51
6.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	42 Kecamatan	41.401.900	41.401.900	100,00
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>189.999.700</b>	<b>186.159.262</b>	<b>97,98</b>
<b>7.1</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		<b>189.999.700</b>	<b>186.159.262</b>	<b>97,98</b>
7.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Wanaraja, Cibatu, Samarang, Leles, Kadungora	150.000.000	146.181.662	97,45

7.1.2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kabupaten Garut	39.999.700	39.977.600	99,94
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>17.278.129.354</b>	<b>16.349.146.959</b>	<b>94,62</b>
<b>8.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>35.150.468</b>	<b>34.630.600</b>	<b>98,52</b>
8.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Garut	27.511.622	27.025.000	98,23
8.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Garut	7.638.846	7.605.600	99,56
<b>8.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>15.079.204.678</b>	<b>14.203.011.338</b>	<b>94,19</b>
8.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Garut	15.077.646.178	14.201.452.838	94,19
8.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Garut	1.558.500	1.558.500	100,00
<b>8.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>149.749.809</b>	<b>149.412.218</b>	<b>99,77</b>
8.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Garut	149.749.809	149.412.218	99,77
<b>8.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>72.350.000</b>	<b>70.062.500</b>	<b>96,84</b>
8.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Garut	72.350.000	70.062.500	96,84
<b>8.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>458.956.905</b>	<b>456.073.672</b>	<b>99,37</b>
8.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Garut	19.620.000	19.600.500	99,90
8.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Garut	202.739.705	200.931.041	99,11
8.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Garut	149.757.300	149.310.531	99,70
8.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Garut	9.999.900	9.966.600	99,67
8.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Garut	21.320.000	21.295.000	99,88
8.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Garut	55.520.000	54.970.000	99,01
<b>8.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>840.277.600</b>	<b>826.264.208</b>	<b>98,33</b>
8.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Garut	756.647.500	749.099.208	99,00
8.6.2	Pengadaan Mebel	Kabupaten Garut	83.630.100	77.165.000	92,27
<b>8.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>270.771.394</b>	<b>246.491.234</b>	<b>91,03</b>
8.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Garut	36.900.000	36.450.000	98,78

8.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Garut	89.999.994	66.377.596	73,75
8.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Garut	143.871.400	143.663.638	99,86
<b>8.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>371.668.500</b>	<b>363.201.189</b>	<b>97,72</b>
8.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Garut	15.300.000	8.507.900	55,61
8.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Garut	75.000.000	75.000.000	100,00
8.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Garut	261.368.700	259.983.289	99,47
8.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Garut	19.999.800	19.710.000	98,55
<b>9</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>4.258.172.625</b>	<b>4.116.397.573</b>	<b>96,67</b>
9.1	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		<b>4.258.172.625</b>	<b>4.116.397.573</b>	<b>96,67</b>
9.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	160.000.000	150.378.823	93,99
9.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kec. Wanaraja Kabupaten Garut	1.457.980.025	1.446.835.700	99,24
9.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kec.Cibalong, Kec.Wanaraja, Kec.Tarogong Kidul, Kec.Malangbo ng, Kec.Limbangan dan Kec.Garut Kota	527.686.600	518.590.800	98,28
9.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kec. Pasirwangi, Cilawu, Bayongbong, Bungbulang, Cisewu, Selaawi, Samarang Kabupaten Garut	2.112.506.000	2.000.592.250	94,70
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>		<b>19.999.900</b>	<b>19.999.900</b>	<b>100,00</b>
<b>10.1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>19.999.900</b>	<b>19.999.900</b>	<b>100,00</b>
10.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di		19.999.900	19.999.900	<b>100,00</b>

	Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Samarang, Limbangan			
11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		60.416.900	60.305.000	99,81
11.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		60.416.900	60.305.000	99,81
11.1.1	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kabupaten Garut	60.416.900	60.305.000	99,81

**2.1.1 Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.**

Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut pada penyelenggaraan Tahun Anggaran 2021 memiliki 11 Program, 18 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Penyelenggaraan program/ kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada prinsipnya dapat mencapai target kinerja hasil/ keluaran. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran tahun 2021 terdapat pada indikator kinerja yaitu indikator *Prosentase peningkatan nilai produksi industri kecil*. Sesuai Renstra Dinas bahwa indikator tersebut memiliki target sebesar 1 % dan hanya dapat direalisasikan sebesar 0,75 %. Adapun kendalanya adalah :

- 1) Karena dalam masa pelaksanaan kegiatan sedang berjalan, terjadi peristiwa yang sangat besar terhadap kelangsungan dan pelaksanaan kegiatan yaitu terjadi **wabah pandemi Covid-19**, sehingga ada beberapa program atau kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yang membuat program dan kegiatan tersebut mengalami penundaan atau tidak dapat dilaksanakan, selain itu dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi ini juga membuat beberapa program dan kegiatan menjadi terhambat.

**2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Sebagaimana tersebut di atas, bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut pada

penyelenggaraan Tahun Anggaran 2021 memiliki 11 Program, 18 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut secara keseluruhan dapat direalisasikan sesuai target yang telah direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran tahun 2021 terdapat pada beberapa indikator kinerja yaitu pada indikator *Nilai hasil evaluasi AKIP*. Sesuai Renstra Dinas bahwa indikator tersebut memiliki target dengan nilai A dan pada tahun 2021 nilai hasil evaluasi SAKIP dapat direalisasikan mendapat nilai A.

Selanjutnya realisasi program/kegiatan yang dapat melebihi target kinerja lainnya yang terdapat pada indikator *Rasio Elektrifikasi*. Target Indikator tersebut pada tahun 2021 sebesar 85 % dan dapat direalisasikan sesuai target yaitu sebesar 85 %.

### **2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran tahun 2021 terdapat pada beberapa indikator kinerja yaitu pada indikator *Prosentase pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarannya*. Sesuai Renstra Dinas bahwa indikator tersebut memiliki target sebesar 24 % dan dapat direalisasikan sebesar 24,57 %.

Selanjutnya realisasi program/kegiatan yang dapat melebihi target kinerja lainnya yang terdapat pada indikator *Pertumbuhan pelaku usaha yang melakukan ekspor*. Target Indikator tersebut pada tahun 2021 sebesar 1 % dan dapat direalisasikan sebesar 1,11 %.

### **2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Pada bagian ini dikemukakan mengenai Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Beberapa program dan kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja, adalah :

- a. Didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan dibidangnya;
- b. Ketersediaan anggaran yang mencukupi;
- c. Sarana dan pra-sarana penunjang yang memadai

Sedangkan beberapa program dan kegiatan yang tidak mencapai target terhadap indikator keberhasilan atau yang menyebabkan penurunan, adalah :

- a. Tidak didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan dibidangnya;
- b. Keterbatasan alokasi anggaran;
- c. Keterbatasan Sarana dan pra-sarana penunjang
- d. Keterbatasan waktu penyelenggaraan.
- e. Karena dalam masa pelaksanaan kegiatan sedang berjalan, terjadi peristiwa yang sangat besar terhadap kelangsungan dan pelaksanaan kegiatan yaitu terjadi **wabah Covid 19**, sehingga hampir semua sektor program atau kegiatan mengalami penundaan dan atau bahkan pembatalan.

#### **2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah :

- Apabila penyelenggaraan program dan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya maka akan berimplikasi positif terhadap kinerja Dinas.
- Apabila penyelenggaraan program dan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya maka akan dilakukan reviu atau evaluasi untuk bahan perencanaan tahun yang akan datang.

#### **2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah :

- Melakukan reviu atau evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak mencapai target;
- Merasionalisasikan program/ kegiatan dan anggaran untuk penyelenggaraan tahun yang akan datang.



- Mengusulkan bantuan pendanaan melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- Mengusulkan staf/ pegawai untuk mengikuti Diklat atau Bintek

Berikut tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2021.

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat DaerahTahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	Semua Urusan									
X.XX	Semua Bidang									
3.31.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran daerah								
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan (dokumen)	12	12	12	12	100%	12	12	100%
3.31.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan (dokumen)	9	9	9	9	100%	9	9	100%
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase jumlah gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.01.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan (jenis dokumen)	4	4	4	4	100%	4	4	100%
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.31.01.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas keamanan (Orang)	4	4	4	4	100%	4	4	100%
3.31.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>prosentase pemenuhan pakaian kerja lapangan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah kebutuhan Pakaian Kerja Lapangan (Orang)	217	217	217	217	100%	217	217	100%
3.31.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>prosentase pemenuhan administrasi Umum perangkat daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik dan elektronik (jenis)	5	5	5	5	100%	5	5	100%
3.31.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor dan peralatan / perlengkapan kantor (unit)	35	10	10	10	100%	35	35	100%
3.31.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	16	16	16	16	100%	16	16	100%
3.31.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan surat kabar (Eksemplar)	102	102	102	102	100%	102	102	100%
3.31.01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kebutuhan makanan dan minuman (orang)	2700	2700	2700	2700	100%	2700	2700	100%
3.31.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	90	90	90	90	100%	90	90	100%
3.31.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>prosentase pemenuhan Pengadaan barang milik daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.01.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional (Unit)	2	2	2	2	100%	2	2	100%
3.31.01.2.07.5	Pengadaan Mebel	jumlah jenis pengadaan meubelair (jenis)	6	6	6	6	100%	6	6	100%
3.31.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>prosentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos yang tersedia (buah)	1366	1366	1366	1366	100%	1366	1366	100%
3.31.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening air, telepon dan listrik (bulan)	12	12	12	12	100%	12	12	100%
3.31.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia jasa Kebersihan kantor yang dibayarkan (orang)	5	5	5	5	100%	5	5	100%
3.31.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>prosentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.31.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara perijinannya ( unit)	30	30	30	30	100%	30	30	100%
3.31.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kebutuhan perawatan kendaraan (unit)	30	30	30	30	100%	30	30	100%
3.31.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah kebutuhan pemeliharaan gedung kantor, Jumlah kebutuhan interior kantor (unit)	5	5	5	5	100%	5	5	100%
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan kerja (unit)	45	45	45	45	100%	45	45	100%
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
<b>3.29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>									
<b>3.29.5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	<b>Prosentase data kelistrikan yang direkonsiliasi</b>	26%	21,43%	21,43%	21,43%	100%	24,49%	24,49%	94%
3.29.5.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	prosentase pendataan kelistrikan yang direkonsiliasi di Kecamatan	26%	21,43%	21,43%	21,43%	100%	24,49%	24,49%	94%
3.29.5.2.01.3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kecamatan yang dimonitoring, meningkat pemahamannya dan yang terekonsiliasi (kecamatan)	4	4	4	4	100%	4	4	100%
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>									
<b>3.30.2</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Prosentase pedagang pasar rakyat yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarannya</b>	0,18		18%	18%	100%	18%	18%	100%
3.30.2.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	prosentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	1		100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.30.02.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen DED, jumlah pasar yg meningkat kebersihannya, jumlah pasar rakyat yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarannya, jumlah kios yang terbangun	1 dok,1393 kios, 4 pasar, 15 pasar rakyat		1 dok,1393 kios, 4 pasar, 15 pasar rakyat	1 dok,1393 kios, 4 pasar, 15 pasar rakyat	100%	1 dok,1393 kios, 4 pasar, 15 pasar rakyat	1 dok,1393 kios, 4 pasar, 15 pasar rakyat	100%
<b>3.30.2.2.02</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Prosentase Gudang yang telah berijin</b>	<b>100</b>		100	100	<b>100%</b>	100	100	100%
3.30.02.2.02.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang	125		50	50	100%	50	50	100%
<b>3.30.3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%
3.30.3.2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>prosentase pemenuhan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%
3.30.3.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan	5		5	5	100%	5	5	100%
3.30.3.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	465		465	465	100%	465	465	100%
3.30.3.2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>	<b>prosentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</b>	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.30.3.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pemungut PAD yang dibina (orang)	50		50	50	100%	50	50	100%
3.30.3.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	7		7	7	100%	7	7	100%
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa</b>	13%		9%	9%	100%	9%	9%	69%
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	13%		9%	9%	100%	9%	9%	69%

3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pasar yang dilakukan monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas barang subsidi yang diawasi	4 lokasi dan 2 komoditas		4 lokasi dan 2 komoditas	4 lokasi dan 2 komoditas	100%	4 lokasi dan 2 komoditas	4 lokasi dan 2 komoditas	100%
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jenis barang yang dilakukan pengawasan	9 komoditas		9 komoditas	9 komoditas	100%	9 komoditas	9 komoditas	100%
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi OPM (lokasi)	20		20	20	100%	20	20	100%
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Prosentase industri kecil yang berorientasi ekspor</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase MOU yang dihasilkan dari promosi dan misi dagang	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah produk unggulan yang berorientasi ekspor	3		3	3	100%	3	3	100%
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	jumlah even pameran (even)	3		3	3	100%	3	3	100%
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Industri Kecil yang Mengikuti Temu Bisnis (orang)	25		25	25		25	25	100%
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa</b>	<b>42%</b>		<b>41,6%</b>	<b>41,6%</b>	100%	<b>41,6%</b>	<b>41,6%</b>	99%
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase pelaku usaha yang dilakukan pengawasan metrologi legal	42%		41,6%	41,6%	100%	41,6%	41,6%	99%
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan, jumlah lokasi yang dilakukan pelayanan pendataan UTTP	1 unit dan 42 kecamatan		1 unit dan 42 kecamatan	1 unit dan 42 kecamatan	100%	1 unit dan 42 kecamatan	1 unit dan 42 kecamatan	100%
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah lokasi yang dilakukan pelayanan tera dan tera ulang (Kecamatan)	42		42	42	100%	42	42	100%
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Prosentase pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitas kewirausahaannya</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%

3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk yang dipromosikan	10		10	10	100%	10	10	100%
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk yang dipromosikan, Jumlah wirausaha yang terlatih	7 produk dan 100 pelaku usaha		7 produk dan 100 pelaku usaha	7 produk dan 100 pelaku usaha	100%	7 produk dan 100 pelaku usaha	7 produk dan 100 pelaku usaha	100%
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang dimasukkan dalam sistem dan jaringan informasi perdagangan	25		25	25	100%	25	25	100%
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>									
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Pertambahan jumlah industri kecil</b>	<b>1%</b>		<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>
3.31.02.2.01	<b>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang tersusun (Dokumen)	1		1	1	100%	1	1	100%
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang terbina	10 IKM, 45 Orang, 20 IKM		10 IKM, 45 Orang, 20 IKM	10 IKM, 45 Orang, 20 IKM	100%	10 IKM, 45 Orang, 20 IKM	10 IKM, 45 Orang, 20 IKM	100%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang ditingkatkan sarana dan prasarana yang ditingkatkan	3 unit, 18 orang, 6 kelompok, 40 orang, 1 unit		3 unit, 18 orang, 6 kelompok, 40 orang, 1 unit	3 unit, 18 orang, 6 kelompok, 40 orang, 1 unit	100%	3 unit, 18 orang, 6 kelompok, 40 orang, 1 unit	3 unit, 18 orang, 6 kelompok, 40 orang, 1 unit	100%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah sentra industri yang dikembangkan dan mendapatkan bantuan	200 IKM, 150 IKM, 40 orang, 1 sentra		200 IKM, 150 IKM, 40 orang, 1 sentra	200 IKM, 150 IKM, 40 orang, 1 sentra	100%	200 IKM, 150 IKM, 40 orang, 1 sentra	200 IKM, 150 IKM, 40 orang, 1 sentra	100%
<b>3.31.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait</b>	<b>5 IKM</b>		<b>5 IKM</b>	<b>5 IKM</b>	<b>100%</b>	<b>5 IKM</b>	<b>5 IKM</b>	<b>100%</b>

3.31.03.2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	prosentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi (orang)	60		50	50	100%	60	60	100%
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Prosentase perusahaan industri, kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten yang masuk dalam SIINas</b>	<b>0,25%</b>		<b>0,16%</b>	<b>0,16%</b>	100%	<b>0,16%</b>	<b>0,16%</b>	64%
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	prosentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah dokumen IKM yang difasilitasi data SIINAS	20		20	20	100%	20	20	100%



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut.**

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa bidang Perindustrian, perdagangan energi dan Sumber Daya Mineral termasuk ke dalam urusan pilihan, hal tersebut tidak memiliki indikator SPM/Standar Nasional maupun IKK. Selanjutnya berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, tiga urusan tersebut digabung menjadi nomenklatur baru yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindagesdm) Kabupaten Garut. Sedangkan Tugas dan Fungsi Disperindagesdm sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Garut No. 265 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut.

Sehubungan dengan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut berpedoman kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD periode tahun 2019-2024. Adapun Indikator kinerja pelayanan Disperindagesdm yang mengacu kepada RPJMD periode tahun 2019-2024 berdasarkan hasil kajian memiliki 5 indikator sasaran, yaitu :

1. Prosentase peningkatan nilai produksi industri kecil;
2. Prosentase pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya;
3. Pertumbuhan pelaku usaha yang sudah ekspor;
4. Rasio elektrifikasi;
5. Nilai Hasil Evaluasi AKIP.

Target dan pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dari tahun sebelumnya serta beberapa tahun kedepan dapat dilihat pada tabel T-C.30 dibawah ini:

Tabel T-C.30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral  
Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Prosentase peningkatan nilai produksi industri kecil	-	-	1%	1%	1%	1%	0.75%	0.85%	1%	1%	
2	Prosentase pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya	-	-	24%	24%	25%	26%	21,13%	24,57%	25%	26%	
3	Pertumbuhan pelaku usaha yang sudah ekspor	-	-	1%	1%	1%	1%	0,6%	1,11%	1%	1%	
4	Rasio elektrifikasi	-	-	84%	85%	85%	85%	89%	85%	85%	85%	
5	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	-	-	A	A	A	A	BB	A	A	A	

Sebagaimana pada *table T-C.30* diatas, bahwa *prosentase peningkatan nilai produksi industri kecil*. Target yang ingin dicapai pada tahun 2021 sebesar 1% dan dapat direalisasikan sebesar 0,85% atau hanya mencapai 85% dari target. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid – 19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia termasuk Kab. Garut sehingga mengganggu semua proses produksi Industri Kecil dan Menengah Kab. Garut. Namun apabila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2020 yaitu sebesar 0,75% maka capaian tahun 2021 mengalami peningkatan. Proyeksi untuk tahun 2022 dan 2023 prosentase dapat meningkat menjadi 1 persen sesuai target apabila pandemi Covid-19 berakhir.

*Prosentase pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarannya* pada tahun 2020 sebesar 21,13 persen dan mengalami peningkatan prosentase di tahun 2021 dengan prosentase sebesar 24,57 persen melebihi dari target yang direncanakan yaitu sebesar 24 persen. Untuk proyeksi 2 tahun kedepan ada kemungkinan mengalami peningkatan menjadi 25 persen apabila pandemi Covid-19 telah berakhir.

*Pertumbuhan pelaku usaha yang sudah ekspor* di tahun 2020 capaian realisasinya sesuai target yaitu sebesar 1 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 1,11 persen melebihi dari target yang ingin dicapai. Hal ini berarti ada peningkatan jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor di tahun 2021. Untuk proyeksi ke depan di tahun 2022 dan tahun 2023 bisa meningkat lagi melebihi target yang sudah ada.

*Rasio elektrifikasi* pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 85% dapat direalisasikan sebesar 85% atau mencapai target. Apabila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2020 yaitu 89%, hasil capaian 2021 mengalami penurunan dikarenakan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dengan adanya perberlakuan PPKM membuat kegiatan tidak bisa berjalan dengan optimal.

*Nilai Hasil Evaluasi AKIP* pada tahun 2021 sudah sesuai target dengan nilai A (Memuaskan), mengalami peningkatan dari capaian target tahun 2020 dengan nilai BB (Sangat Baik). Capaian realisasi

untuk nilai hasil evaluasi AKIP pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksi bisa melebihi atau tetap pada nilai A (Memuaskan).

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

- Masih rendahnya daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern.
- Sebagian besar pelaku usaha perdagangan belum melek teknologi baik dalam proses bertransaksi melalui e-banking maupun e-commerce
- Kapasitas pelaku usaha IKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0 masih rendah
- Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan.
- Kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif yang menyebabkan terbatasnya akses ekspor.

#### **2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.**

- **Permasalahan**

- **Bidang Perindustrian :**

1. Masih belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal
2. Masih rendahnya kemampuan IKM dalam memanfaatkan teknologi industri
3. Masih belum optimalnya kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk yang berdaya saing dan berorientasi ekspor
4. Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan
5. Belum adanya sinergi antara IKM dan Industri Menengah Besar/Rendahnya IKM sebagai pemasok IMB
6. Masih rendah kapasitas SDM IKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0

**Bidang Perdagangan :**

1. Masih terbatasnya kemampuan manajemen pengelola pasar
2. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen
3. Masih tingginya biaya distribusi barang terutama di wilayah Garut Selatan
4. Rendahnya daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern
5. Belum optimalnya sarana prasarana perdagangan
6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas data perdagangan

**Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :**

1. Masih rendahnya kualitas data kelistrikan
2. Masih rendahnya rasio elektrifikasi
3. Terbatasnya kewenangan daerah dalam bidang ESDM

• **Hambatan**

1. Belum seluruhnya ASN memiliki komitmen yang tinggi dan profesional;
2. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan dukungan anggaran yang tersedia;
3. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam mengakses teknologi informasi dan teknologi tepat guna;
4. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana perindustrian dan perdagangan serta belum ramah lingkungan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya energi dan sumber daya mineral;
6. Masih rendahnya Kemampuan pelaku usaha industri dan perdagangan dalam pengembangan bahan baku lokal dan pemanfaatan teknologi industry

**2.3.2 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.**

Dalam rangka mewujudkan Tujuan maupun Sasaran Organisasi, maka untuk Penentuan program dan kegiatan, dilakukan secara cermat, efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil (outcome). Adapun tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Energi dan Sumber Daya mineral, adalah sebagai berikut :

- **Tantangan**

1. Kondisi ekonomi mikro dan makro tidak stabil sering mengalami fluktuasi;
2. Dampak negatif arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat;
3. Kebijakan pemerintah terkait pasar bebas yang menyebabkan membanjirnya produk impor sehingga dapat menyulitkan terhadap produk lokal untuk bersaing ditingkat nasional maupun internasional;
4. Kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan kawasan hutan lindung, dapat menyebabkan pengembangan bagi pelaku usaha industri serta pemanfaatan sumber energi dan sumber daya mineral;
5. Terjadinya alih fungsi lahan dan daya dukung lingkungan akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lahan secara lestari.

- **Peluang**

1. Terbukanya peluang pengembangan bagi pelaku usaha industri dan perdagangan;
2. Terbukanya akses informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, peluang usaha baik secara regional maupun global;
3. Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat bagi para investor dalam pengembangan pelaku usaha industri dan perdagangan;
4. Meningkatnya perhatian pemerintah pusat maupun provinsi terhadap pengembangan daerah melalui bantuan keuangan seperti DAK, Banprov dan tugas pembantuan;
5. Letak geografis Kab. Garut sangat cocok bagi pengembangan usaha industri dan perdagangan serta sebagai daerah penyangga ibu kota sangat memadai bagi pemasaran hasil produk.

### **2.3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

#### **Isu-isu Strategis**

- **Bidang Perindustrian :**

1. Pemanfaatan bahan baku lokal
  2. Kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif yang menyebabkan terbatasnya akses ekspor
  3. Penguasaan teknologi dan digitalisasi Industri Kecil dan Menengah
  4. Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan.
  5. Kapasitas SDM IKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0
  6. Pemulihan ekonomi IKM selama masa pandemi Covid-19.
- **Bidang Perdagangan :**
    1. Kemampuan pengelola pasar.
    2. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
    3. Biaya transportasi dari dan menuju daerah bagian selatan relatif tinggi karena jalan berliku ke daerah pegunungan.
    4. Daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern
  - **Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :**
    1. Rasio elektrifikasi.
    2. Pengelolaan energi yang berkelanjutan.
    3. Kemampuan masyarakat dalam pembangunan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan.
    4. Terbatasnya kewenangan daerah dalam bidang ESDM

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Program/ kegiatan dan anggaran sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 merupakan hasil dari usulan Dinas (Teknokratis) dan hasil musrenbang tingkat Kecamatan. Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 perlu direviu dan dianalisis secara cermat agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran serta berorientasi pada hasil (outcome).

Setelah beberapa kali dilakukan penela'ahan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 maka dapat dihasilkan rekapitulasi Program/ kegiatan dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk melihat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel T-C.31 RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN GARUT TAHUN 2023

Nomor		Rancangan Awal RKPD				
NO	KODE	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET 2023	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	3	URUSAN PEMERINTAHAN				
	3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA				249,000,000
1	3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Presentase perusahaan yang berizin	25.49 %		249,000,000
	3 29 05 2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	25.49 %		249,000,000
	3 29 05 2.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249,000,000
	3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				108,578,607,000
2	3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	19 pelaku usaha		502,500,000
	3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	prosentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	100%		200,000,000

Hasil Analisis Kebutuhan				
URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET 2023	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				249,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Presentase perusahaan yang berizin	25.49 %		249,000,000
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	25.49 %		249,000,000
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				108,578,607,000
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	19 pelaku usaha		502,500,000
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	prosentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	100%		200,000,000



						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000
	3	30	02	2.02		<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	Prosentase Gudang yang telah berijin	100%		<b>302,500,000</b>
	3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	302,500,000
	3	3	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10 Unit		<b>102,600,000,000</b>
	3	30	03	2.01		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	jumlah pasar yang dibangun	4 Unit		<b>101,760,000,000</b>
	3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000,000
	3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,760,000,000
	3	30	03	2.02		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Prosentase pembinaan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%		<b>840,000,000</b>

						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000
						<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	Prosentase Gudang yang telah berijin	100%		<b>302,500,000</b>
						Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	302,500,000
						<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan	10 Unit		<b>102,600,000,000</b>
						<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	jumlah pasar yang dibangun	4 Unit		<b>101,760,000,000</b>
						Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000,000
						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,760,000,000
						<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Prosentase pembinaan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%		<b>840,000,000</b>

3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	440,000,000
4	3	30	04		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13 %		<b>2,169,017,000</b>
3	30	04	2.02		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	prosentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	13 %		<b>2,169,017,000</b>
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,650,000

					Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000
					Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	440,000,000
					<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13 %		<b>2,169,017,000</b>
					<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	prosentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	13 %		<b>2,169,017,000</b>
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,650,000

						Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,032,367,000
5	3	30	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7 Jenis		<b>1,435,000,000</b>
	3	30	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase MOU yang dihasilkan dari promosi dan misi dagang	100%		<b>1,435,000,000</b>
	3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	25 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000
	3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	100 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	685,000,000
	3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	25 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350,000,000
6	3	30	06			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	41.9 %		<b>579,090,000</b>
	3	30	06	2.01		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Prosentase pelaku usaha yang dilakukan pengawasan metrologi legal	41.9 %		<b>579,090,000</b>

						Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,032,367,000
						<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7 Jenis		<b>1,435,000,000</b>
						<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase MOU yang dihasilkan dari promosi dan misi dagang	100%		<b>1,435,000,000</b>
						Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	25 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000
						Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	100 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	685,000,000
						Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	25 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350,000,000
						<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	41.9 %		<b>579,090,000</b>
						<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Prosentase pelaku usaha yang dilakukan pengawasan metrologi legal	41.9 %		<b>579,090,000</b>

3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3000 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	469,090,000
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000
7	3	30	07		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	jenis produk yg dipromosikan	14 Jenis		<b>1,293,000,000</b>
3	30	07	2.01		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Prosentase peningkatan pendapatan pelaku usaha produk ekspor unggulan	100%		<b>1,293,000,000</b>
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	60 UMKM	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	850,000,000
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	443,000,000
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG</b>				<b>31,778,499,299</b>
8	3	31	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %		<b>20,678,499,299</b>
3	31	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan	100 %		<b>195,265,000</b>
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	45,265,000

					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3000 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	469,090,000
					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000
					<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	jenis produk yg dipromosikan	14 Jenis		<b>1,293,000,000</b>
					<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Prosentase peningkatan pendapatan pelaku usaha produk ekspor unggulan	100%		<b>1,293,000,000</b>
					Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa	60 UMKM	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	850,000,000
					Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	443,000,000
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>31,778,499,299</b>
					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %		<b>20,678,499,299</b>
					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan	100 %		<b>195,265,000</b>
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	45,265,000

3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	20,000,000
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	20,000,000
3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	20,000,000
3	31	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	20,000,000
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	50,000,000
3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	20,000,000
3	31	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase dokumen administrasi keuangan sesuai ketentuan	100 %		<b>16,990,679,243</b>

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	20,000,000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	20,000,000
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	20,000,000
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	20,000,000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	50,000,000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	20,000,000
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase dokumen administrasi keuangan sesuai	100 %		<b>16,990,679,243</b>

3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bulan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	16,967,084,243
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	23,595,000
3	31	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan	100 %		<b>150,000,000</b>
3	31	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	150,000,000
3	31	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100 %		<b>350,000,000</b>
3	31	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	150,000,000
3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	200,000,000
3	31	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	prosentase pemenuhan administrasi Umum perangkat daerah	100 %		<b>615,597,056</b>
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	19,627,000
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	200,000,000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bulan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	16,967,084,243
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	23,595,000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan	100 %		<b>150,000,000</b>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	150,000,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	prosentase pemenuhan administrasi	100 %		<b>350,000,000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	150,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	200,000,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	prosentase pemenuhan administrasi Umum perangkat daerah	100 %		<b>615,597,056</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	19,627,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	200,000,000

3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	194,533,106
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	10,000,000
3	31	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	5,000,000
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	136,436,950
3	31	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	50,000,000
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	prosentase pemenuhan barang milik daerah	100 %		<b>1,500,000,000</b>
3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	1,000,000,000
3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100,000,000
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	400,000,000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	194,533,106
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	10,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	5,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	136,436,950
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	50,000,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	prosentase pemenuhan barang milik daerah	100 %		<b>1,500,000,000</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	1,000,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	400,000,000

	3	31	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	prosentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		<b>297,500,000</b>	
	3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	7,500,000
	3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	90,000,000
	3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	200,000,000
	3	31	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	prosentase barang milik daerah yang berkualitas baik	100 %		<b>579,458,000</b>	
	3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	30,000,000
	3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	104,458,000
	3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	405,000,000
	3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	40,000,000

					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	prosentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		<b>297,500,000</b>
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	7,500,000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	90,000,000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	200,000,000
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	prosentase barang milik daerah yang berkualitas baik	100 %		<b>579,458,000</b>
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	30,000,000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	104,458,000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	405,000,000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	40,000,000



9	3	31	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	pertambahan jumlah industri kecil	1 %			<b>10,700,000,000</b>
	3	31	02	2.01		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	1 Dokumen 100%			<b>10,700,000,000</b>
	3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000
	3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,500,000,000
	3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,000,000,000
	3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi,	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	Kab. Garut,		8,000,000,000

<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	pertambahan jumlah industri kecil	1 %		<b>10,700,000,000</b>
<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk	1 Dokumen 100%		<b>10,700,000,000</b>
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kab. Garut, Garut Kota,	8,000,000,000

					dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Garut Kota, Cimuncang Kab. Garut, Wanaraja, Wanamekar Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pananjung Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango Kab. Garut, Tarogong Kaler, Sirnajaya Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukajaya Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirkiamis Kab. Garut, Pasirwangi.	
10	3	31	03		<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	10 IKM		200,000,000
	3	31	03	2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	prosentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%		200,000,000

					Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Cimuncang Kab. Garut, Wanaraja, Wanamekar Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pananjung Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango Kab. Garut, Tarogong Kaler, Sirnajaya Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukajaya Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirkiamis Kab. Garut, Pasirwangi, Padawaas Kab. Garut, Leles, Sukarame Kab. Garut, Kadungora, Gandamekar Kab. Garut, Kadungora, Tanggulun Kab. Garut, Kadungora, Talagasari	
					<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	10 IKM		200,000,000
					<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	prosentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	100%		200,000,000

						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000
11	3	31	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	0.2 %		200,000,000
	3	31	04	2.01		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	prosentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	100.0 %		200,000,000
	3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000
<b>TOTAL</b>										<b>140,606,106,299</b>

						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000
						<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII	0.2 %		200,000,000
						<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	prosentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI	100.0 %		200,000,000
						Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000
<b>TOTAL</b>										<b>140,606,106,299</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menetapkan Rencana Kerja 2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut menampung berbagai usulan dan aspirasi dari berbagai elemen seperti pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa, asosiasi-asosiasi, kelompok masyarakat, dan para pelaku IKM. Usulan-usulan tersebut diperoleh antara lain melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Audiensi dari asosiasi-asosiasi, dan Pembinaan terhadap pelaku IKM.

Penentuan program/kegiatan dilakukan secara cermat, efektif dan tepat sasaran serta disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil usulan masyarakat untuk program dan kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Tahun 2023, kegiatan-kegiatan yang diusulkan mengarah pada 1 program yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Penjelasan Program dan Kegiatan Masyarakat sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel T-C.32

### Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Garut

Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Cata tan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				

1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Garut Kota-Cimuncang, Wanaraja-Wanamekar, Tarogong Kaler-Pananjung, Tarogong Kaler-Rancabango, Tarogong Kaler-Sirnajaya, Tarogong Kidul-Sukajaya, Tarogong Kidul-Haurpanggung, Pasirwangi-Pasirkiamis, Pasirwangi-Padawaas, Leles-Sukarame, Kadungora-Gandamekar, Kadungora-Tanggulun, Kadungora-Talagasari, Kadungora-Rancasalak, Malangbong-Campaka, Sukawening-Sukamukti, Karangtengah-Sindanggalih, Bayongbong-Hegarmanah, Cilawu-Ngamplang, Cisurupan-Cidatar, Cisurupan-Pamulihan, Sukaresmi-Cintadamai, Sukaresmi-Sukajaya, Cikajang-Margamulya,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8.000.000.000	
-----	--	---	---	---------------	--

		Banjarwangi- Wangunjaya, Singajaya-Singajaya, Singajaya- Karangagung, Cihurip-Cihurip, Cihurip-Cisangkal, Cihurip-Mekarwangi, Cihurip-Jayamukti, Peundeuy-Purwajaya, Cisompet- Margamulya, Cisompet-Sukamukti, Cisompet-Cikondang, Pamulihan- Pakenjeng, Pamulihan- Garumukti, Pamulihan- Linggarjati, Talegong- Mekarmukti, Selaawi- Selaawi, Selaawi- Cirapuhan, Selaawi- Mekarsari, Cibiuk- Lingkungpasir, Sucinaraja-Sukaratu, Sucinaraja- Linggamukti			
	<b>JUMLAH</b>			<b>8.000.000.000</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

---

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan rencana kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2023 tidak terlepas dari hasil Telaahan terhadap Arah Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023. Adapun maksud dilakukannya penelaahan agar adanya keselarasan dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Arah Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang selaras dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

- Arah kebijakan Nasional dan Program Prioritas Tahun 2023 yang selaras dengan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu *Pembangunan rendah karbon dan transisi energi. Program Prioritas Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, salah satunya panas bumi yang merupakan transisi energi dari energi fosil menjadi EBT.*
- Arah kebijakan Nasional dan Program Prioritas Tahun 2023 yang selaras dengan urusan Perindustrian, yaitu : *Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Program Prioritas Pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter.*
- Arah kebijakan Nasional dan Program Prioritas Tahun 2023 yang selaras dengan urusan Perdagangan, yaitu :
  - *Menjaga neraca perdagangan.*
  - *Mengamankan dan memperkuat pasar dalam negeri.*
  - *Menyederhanakan birokrasi dan pembangunan sumber daya manusia.*

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut.

Penentuan Tujuan dan Sasaran Renja tahun 2023 beserta indikatornya dihasilkan dari rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut periode 2019-2024.

Adapun penjelasan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

#### Tujuan dan sasaran Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022
Meningkatnya kontribusi perindustrian dalam mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Pertumbuhan Industri Kecil	Meningkatnya nilai produksi industri kecil	Prosentase peningkatan nilai produksi industri kecil	1 %
		Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	A
Meningkatnya peran sektor Perdagangan terhadap kemandirian ekonomi	Prosentase pertumbuhan perdagangan	Meningkatnya pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya	Prosentase pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya	25%
		Meningkatnya pelaku usaha yang melakukan ekspor	Pertumbuhan pelaku usaha yang sudah ekspor	10 %
Meningkatnya penggunaan Energi Baru Terbarukan	Prosentase penggunaan Energi Baru Terbarukan di daerah	Meningkatnya perizinan pemanfaatan langsung panas bumi	Prosentase perusahaan yang berizin	85%



### **3.3 Program dan Kegiatan**

Kebijakan penetapan rencana Program dan Kegiatan tahun 2023 dihasilkan dari proses analisis dan pengkajian yang mengarah pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode tahun 2019-2024 dan dijabarkan ke Renstra Dinas yang memuat Tujuan dan Sasaran.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan dan kebijakan penetapan rencana Program dan Kegiatan tahun 2023 selain mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah juga mengacu antara lain kepada :

- a. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- b. Pengentasan kemiskinan, program dan kegiatan yang dirumuskan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan tujuan meningkatkan perekonomian melalui tingginya daya beli masyarakat sehingga mengurangi jumlah persentase penduduk miskin di Kab. Garut yang apabila dibandingkan dengan daerah lain persentase penduduk miskin di Kab. Garut masih diatas rata-rata.
- c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, salah satu potensi ekonomi daerah Kab. Garut adalah memiliki komoditi-komoditi unggulan yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan ekonomi sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih efisien dan berdaya saing sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Program yang terdapat pada Renstra Disperindag ESDM periode tahun 2019-2024 untuk lima tahun kedepan mengalami perubahan program yang signifikan. Pada periode tahun sebelumnya jumlah total program Disperindagesdm sebanyak 21 program, sementara untuk penyelenggaraan periode tahun 2019-2024 (lima tahun kedepan)

mengalami rasionalisasi/ efisiensi menjadi 10 program. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan, bahwa satu program hanya digunakan oleh satu bidang dan tidak boleh digunakan oleh bidang yang lainnya.

Untuk tahun 2023 Program dan Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut daftar program dan kegiatan tahun 2023.

<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
<b>B</b>	<b>PROGRAM , KEGIATAN dan SUB KEGIATAN</b>	
	<b>1.1</b>	<b>Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan</b>
	1.1.1	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1.1.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
	<b>2.1.</b>	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>
	2.1.1.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
	2.1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	2.1.2.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
	2.1.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
	<b>2.2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>
	2.2.1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	2.2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
	2.2.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	2.2.2.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
	2.2.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
	2.2.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
	<b>2.3.</b>	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>
	2.3.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

2.3.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.3.1.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
2.3.1.3	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
<b>2.4</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>
2.4.1	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.4.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
2.4.1.2	Pameran Dagang Lokal
2.4.1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
<b>2.5</b>	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>
2.5.1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
2.5.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
2.5.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
<b>2.6</b>	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>
2.6.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
2.6.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
2.6.1.2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
<b>3.1</b>	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>
3.1.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
3.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3.1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
<b>3.2</b>	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>
3.2.1	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>

	3.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup (IUI), IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
	<b>3.3</b>	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>
	3.3.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
	3.3.1.1	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
	<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>
	3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.5	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>

	6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	6.2	Pengadaan Mebel
	6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### 3.3.1 Jumlah Program dan Kegiatan

Rekapitulasi program dan kegiatan hasil analisis serta kajian Disperindagesdm tahun 2023 sebanyak 11 Program 20 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan , dengan rincian sebagai berikut :

- Sekretariat 1 program 8 kegiatan 29 sub kegiatan;
- Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Program 1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan;
- Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan 6 Program 8 Kegiatan 16 Sub Kegiatan;
- Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian 3 Program 3 Kegiatan 6 Sub Kegiatan.

Adapun sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2023 dapat tersebar ke berbagai kawasan di Kab. Garut terutama kawasan industri dengan disesuaikan pada kebutuhan masing-masing kawasan/wilayah dan diperuntukkan untuk kelompok masyarakat khususnya para pelaku industri dan pelaku usaha perdagangan.

### **3.3.2 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.**

Mekanisme penyusunan Rencana kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 dilakukan berdasarkan proses Teknokratis, Politis, Partisipatif dan top down/ bottom up. Kebutuhan dana/ pagu program dan kegiatan dimaksud berasal dari tiga sumber pendanaan, yaitu dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Adapun dana/pagu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tahun 2023, adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :

- APBD Kabupaten	Rp	53.806.106.299,-
- APBD Provinsi	Rp.	800.000.000,-
- APBN	Rp.	<u>86.000.000.000,-</u>
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>140.606.106.299,-</b>

Kebijakan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil penelaahan serta kajian antara RKPD dengan tugas dan fungsi Dinas, sehingga dapat menghasilkan program/ kegiatan maupun anggaran yang efektif, efisien serta berorientasi pada hasil.

Penjelasan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel T-C.33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3	29	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>															
3	29	05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>														
3	29	05	2.01	<b>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>													
3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang berizin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang berizin	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	1 Laporan	25.49 %	249,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Presentase perusahaan yang berizin	25.49 %	260,000,000
3	30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>															
3	30	02	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>														
3	30	02	2.01	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>													
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 pelaku usaha	2 Dokumen	19 Pelaku Usaha	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	19 pelaku usaha	160,000,000
3	30	02	2.02	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>													
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 pelaku usaha	1 Dokumen	19 Pelaku Usaha	302,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	19 pelaku usaha	320,000,000
3	30	03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>														
3	30	03	2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>													
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	5 Unit	10 Unit	100,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DAK Pusat	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10 Unit	65,555,500,000
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	5 Unit	10 Unit	1,760,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10 Unit	1,800,000,000
3	30	03	2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>													
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	1 Dokumen	10 Unit	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10 Unit	400,000,000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	1 Dokumen	10 Unit	440,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10 Unit	450,000,000

3	30	04		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>						<b>2,169,017,000</b>				<b>2,295,000,000</b>			
3	30	04	2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>						<b>2,169,017,000</b>				<b>2,295,000,000</b>			
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	1 Laporan	13 %	80,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13 %	85,000,000
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	1 Laporan	13 %	56,650,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13 %	60,000,000
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	1 Laporan	13 %	2,032,367,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13 %	2,150,000,000
3	30	05		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>						<b>1,435,000,000</b>				<b>1,469,000,000</b>			
3	30	05	2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>1,435,000,000</b>				<b>1,469,000,000</b>			
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Jenis	25 Pelaku Usaha	7 Jenis	400,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7 Jenis	420,000,000
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Jenis	100 Pelaku Usaha	7 Jenis	685,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7 Jenis	689,000,000
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Jenis	25 Pelaku Usaha	7 Jenis	350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7 Jenis	360,000,000
3	30	06		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>						<b>579,090,000</b>				<b>620,000,000</b>			
3	30	06	2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>						<b>579,090,000</b>				<b>620,000,000</b>			
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.9 %	3000 Unit	41.9 %	469,090,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	41.9 %	500,000,000
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.9 %	100 Orang	41.9 %	110,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	41.9 %	120,000,000
3	30	07		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>						<b>1,293,000,000</b>				<b>1,293,000,000</b>			
3	30	07	2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>						<b>1,293,000,000</b>				<b>1,293,000,000</b>			
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jenis produk yg dipromosikan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah produk yang dipromosikan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Jenis	60 UMKM	14 Jenis	850,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	jenis produk yg dipromosikan	14 Jenis	850,000,000



3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	jenis produk yg dipromosikan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah produk yang dipromosikan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Jenis	1 Dokumen	14 Jenis	443,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	jenis produk yg dipromosikan	14 Jenis	443,000,000
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>								<b>31,778,499,299</b>			<b>31,891,211,243</b>	
3	31	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								<b>20,678,499,299</b>			<b>20,791,211,243</b>	
3	31	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>195,265,000</b>			<b>200,000,000</b>	
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	11 Dokumen	100 %	45,265,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	3 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
3	31	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	3 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	7 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	3 Laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
3	31	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>16,990,679,243</b>			<b>16,997,084,243</b>	

3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 %	157 Orang/bulan	100 %	16,967,084,243	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	16,967,084,243
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 %	1 Laporan	100 %	23,595,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>150,000,000</b>				<b>160,000,000</b>
3	31	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 %	1 Laporan	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	160,000,000
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>350,000,000</b>				<b>360,000,000</b>
3	31	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 %	1 Paket	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	160,000,000
3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 %	100 Orang	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>615,597,056</b>				<b>616,627,000</b>
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 %	1 Paket	100 %	19,627,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	19,627,000
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 %	1 Paket	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 %	1 Paket	100 %	194,533,106	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	195,000,000
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
3	31	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000

3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Laporan	100 %	136,436,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	137,000,000
3	31	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	10 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>1,500,000,000</b>			<b>1,510,000,000</b>		
3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	6 Unit	100 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000,000
3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	110,000,000
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	10 Unit	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	400,000,000
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>297,500,000</b>			<b>307,500,000</b>		
3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Laporan	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	7,500,000
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Laporan	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Laporan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>579,458,000</b>			<b>640,000,000</b>		
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	11 Unit	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	2 Unit	100 %	104,458,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	105,000,000

3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	6 Unit	100 %	405,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	455,000,000
3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	2 Unit	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
3	31	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>							<b>10,700,000,000</b>				<b>10,700,000,000</b>	
3	31	02	2.01		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>							<b>10,700,000,000</b>				<b>10,700,000,000</b>	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	pertambahan jumlah industri kecil	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 Dokumen	1 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	pertambahan jumlah industri kecil	1 %	200,000,000
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	pertambahan jumlah industri kecil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertambahan jumlah industri kecil	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 Dokumen	1 %	1,500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	pertambahan jumlah industri kecil	1 %	1,500,000,000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	pertambahan jumlah industri kecil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertambahan jumlah industri kecil	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 Dokumen	1 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Bankeu Propinsi	pertambahan jumlah industri kecil	1 %	1,000,000,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	pertambahan jumlah industri kecil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertambahan jumlah industri kecil	Kab. Garut, Garut Kota, Cimuncang, Kab. Garut, Wanaraja, Wanamekar, Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pananjung, Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango, Kab. Garut, Tarogong Kaler, Sirnajaya, Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukajaya, Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung, Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirkiamis, Kab. Garut, Pasirwangi, Padawaas, Kab. Garut, Leles, Sukarame, Kab. Garut, Kadungora, Gandamekar, Kab. Garut, Kadungora, Tanggulun, Kab. Garut, Kadungora, Talagasari, Kab. Garut, Kadungora, Rancasatak	1 %	1 Dokumen	1 %	8,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	pertambahan jumlah industri kecil	1 %	8,000,000,000



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

---

Rumusan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 dihimpun dari beberapa sumber usulan yaitu :

- a. Teknokratis;
- b. Partisipatif;
- c. Politis, dan
- d. Top-down dan bottom -up

Dalam rangka menyelenggarakan Rencana Kerja Tahun 2023 yang terkait dengan urusan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, maka perlu disusun rumusan rencana Program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas serta mengacu kepada RPJMD periode tahun 2019 – 2024, Renstra Dinas periode tahun 2019 – 2024 dan RKPD tahun 2022. Selain dari pada itu rumusan program/ kegiatan dimaksud diperlukan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan sangat tergantung pada ketersediaan Anggaran, bila seandainya jumlah anggaran yang tersedia tidak memadai.

Untuk penyelenggaraan program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2023, penganggarannya disusulkan melalui beberapa sumber pendanaan, yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Berikut rumusan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah  
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Usuran/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Akhir Periode Renstra OPD	Relisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2023				Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Nasional	Daerah		Target Capaian			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
								Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target								
3		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																							
3	29	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>																							
3	29	05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>																249,000,000				260,000,000		
3	29	05	2.01	<b>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																249,000,000				260,000,000	Dinas Perindustrian,
3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	Persentase perusahaan yang berizin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas	Persentase perusahaan yang berizin			1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.49 %	1 Laporan	25.49 %	249,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	peleku usaha	Persentase perusahaan yang berizin	25.49 %	260,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral			
3	30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>																							
3	30	02	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>																108,578,607,000				74,362,500,000		
3	30	02	2.01	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>																502,500,000				480,000,000	Dinas Perindustrian,
3	30	02	2.01	01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan			2 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 pelaku usaha	2 Dokumen	19 Pelaku Usaha	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	peleku usaha	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	19 pelaku usaha	160,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral			
3	30	02	2.02	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>																302,500,000				320,000,000	Dinas Perindustrian,
3	30	02	2.02	01	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan			1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 pelaku usaha	1 Dokumen	19 Pelaku Usaha	302,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	peleku usaha	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	19 pelaku usaha	320,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral			
3	30	03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>																102,600,000,000				68,205,500,000	Dinas Perindustrian,	
3	30	03	2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>																101,760,000,000				67,355,500,000	Dinas Perindustrian,
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya			5 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	5 Unit	10 Unit	100,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, DAK Pusat	peleku usaha	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10 Unit	65,555,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral			
3	30	03	2.01	02	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya			5 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	5 Unit	10 Unit	1,760,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	peleku usaha	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10 Unit	1,800,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral			
3	30	03	2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>																840,000,000				850,000,000	Dinas Perindustrian,
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya			1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	1 Dokumen	10 Unit	400,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	peleku usaha	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10 Unit	400,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral			
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya			1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	1 Dokumen	10 Unit	440,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	peleku usaha	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10 Unit	450,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral			
3	30	04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>																2,169,017,000				2,295,000,000	Dinas Perindustrian,	
3	30	04	2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>																2,169,017,000				2,295,000,000	Dinas Perindustrian,
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok			1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	1 Laporan	13 %	80,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	peleku usaha	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13 %	85,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral			
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok			1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	1 Laporan	13 %	56,650,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	peleku usaha	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13 %	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral			
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok			1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	1 Laporan	13 %	2,032,367,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	peleku usaha	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13 %	2,150,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral			
3	30	05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>																1,435,000,000				1,469,000,000	Dinas Perindustrian,	
3	30	05	2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																1,435,000,000				1,469,000,000	Dinas Perindustrian,
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah sektor usaha yang berpartisipasi ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibiaya	Jumlah sektor usaha yang berpartisipasi ekspor			25 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Jenis	25 Pelaku Usaha	7 Jenis	400,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	peleku usaha	Jumlah sektor usaha yang berpartisipasi ekspor	7 Jenis	420,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral			

3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor			100 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Jenis	100 Pelaku Usaha	7 Jenis	685,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		peleku usaha	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7 Jenis	689,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor			25 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Jenis	25 Pelaku Usaha	7 Jenis	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		peleku usaha	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7 Jenis	360,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	30	06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>																			579,090,000	620,000,000	Dinas Perindustrian,	
3	30	06	2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>																			579,090,000	620,000,000	Dinas Perindustrian,
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa			3000 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.9 %	3000 Unit	41.9 %	469,090,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		peleku usaha	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	41.9 %	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Perwujudan Metrologi Legal	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa			100 Orang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.9 %	100 Orang	41.9 %	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		peleku usaha	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	41.9 %	120,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	30	07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>																			1,293,000,000	1,293,000,000	Dinas Perindustrian,	
3	30	07	2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>																			1,293,000,000	1,293,000,000	Dinas Perindustrian,
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jenis produk yg dipromosikan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa	Jumlah produk yang dipromosikan			60 UMKM	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Jenis	60 UMKM	14 Jenis	850,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		peleku usaha	Jenis produk yg dipromosikan	14 Jenis	850,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jenis produk yg dipromosikan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah produk yang dipromosikan			1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Jenis	1 Dokumen	14 Jenis	443,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		peleku usaha	Jenis produk yg dipromosikan	14 Jenis	443,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>																			31,778,499,299	31,891,211,243			
3	31	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																			20,678,499,299	20,791,211,243	Dinas Perindustrian,	
3	31	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																			195,265,000	200,000,000	Dinas Perindustrian,
3	31	01	2.01	01	Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan			11 Dokumen	Kab. Garut, evTatuoagsoing aKidul, Haurpanggung	100 %	11 Dokumen	100 %	45,265,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan			1 Dokumen	Kab. Garut, evTatuoagsoing aKidul, Haurpanggung	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan			3 Dokumen	Kab. Garut, evTatuoagsoing aKidul, Haurpanggung	100 %	3 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan			1 Dokumen	Kab. Garut, evTatuoagsoing aKidul, Haurpanggung	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	31	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan			7 Laporan	Kab. Garut, evTatuoagsoing aKidul, Haurpanggung	100 %	7 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		



3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan			3 Laporan	Kab. Garut, ev Taluagoing aKidul, Haurpanggung	100 %	3 Laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>16,990,679,243</b>					<b>16,997,084,243</b>	Dinas Perindustrian,	
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			157 Orang/b	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	157 Orang/b	100 %	16,967,084,243	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	16,967,084,243	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Laporan	100 %	23,595,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>											<b>150,000,000</b>					<b>160,000,000</b>	Dinas Perindustrian,	
3	31	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Laporan	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	160,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>350,000,000</b>					<b>360,000,000</b>	Dinas Perindustrian,	
3	31	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Paket	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	160,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			100 Orang	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 Orang	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>615,597,956</b>					<b>616,627,000</b>	Dinas Perindustrian,	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Paket	100 %	19,627,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	19,627,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Paket	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Paket	100 %	194,533,106	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	195,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Dokumen	100 %		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Laporan	100 %		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			10 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	10 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>1,500,000,000</b>					<b>1,510,000,000</b>	Dinas Perindustrian,	
3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran			6 Unit	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	6 Unit	100 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	

3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		1 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpangung	100 %	1 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	110,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		10 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpangung	100 %	10 Unit	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	400,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>297,500,000</b>					<b>307,500,000</b>	Dinas Perindustrian,
3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		1 Laporan	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpangung	100 %	1 Laporan	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	7,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		1 Laporan	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpangung	100 %	1 Laporan	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		1 Laporan	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpangung	100 %	1 Laporan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>579,458,000</b>					<b>640,000,000</b>	Dinas Perindustrian,
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		11 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpangung	100 %	11 Unit	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		2 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpangung	100 %	2 Unit	100 %	104,458,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	105,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		6 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpangung	100 %	6 Unit	100 %	405,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	455,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		2 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpangung	100 %	2 Unit	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>										<b>10,700,000,000</b>					<b>10,700,000,000</b>	Dinas Perindustrian,
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>										<b>10,700,000,000</b>					<b>10,700,000,000</b>	Dinas Perindustrian,
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	pertambahan jumlah industri kecil	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil		1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 Dokumen	1 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	peleku usaha	pertambahan jumlah industri kecil	1 %	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	pertambahan jumlah industri kecil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertambahan jumlah industri kecil		1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 Dokumen	1 %	1,500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	peleku usaha	pertambahan jumlah industri kecil	1 %	1,500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	pertambahan jumlah industri kecil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertambahan jumlah industri kecil		1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 Dokumen	1 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, Banku	peleku usaha	pertambahan jumlah industri kecil	1 %	1,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	pertambahan jumlah industri kecil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertambahan jumlah industri kecil		1 Dokumen	Kab. Garut, Garut Kota, Cimuncung Kab. Garut, Wanaraja, Wanamekar Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pananjung Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango Kab. Garut, Tarogong Kaler, Sirajaya Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukajaya Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirkamis Kab. Garut, Pasirwangi, Padawase Kab. Garut, Leles, Sukarame Kab. Garut, Kadungora, Gandamekar Kab. Garut, Kadungora, Tanggukan Kab. Garut, Kadungora, Talagasari Kab. Garut, Kadungora, Rancasalak	1 %	1 Dokumen	1 %	8,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	peleku usaha	pertambahan jumlah industri kecil	1 %	8,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>															<b>200,000,000</b>					<b>200,000,000</b>	Dinas Perindustrian,	
3	31	03	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										<b>200,000,000</b>						<b>200,000,000</b>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait		1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 IKM	1 Dokumen	10 IKM	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	peleku usaha	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	10 IKM	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>															<b>200,000,000</b>						<b>200,000,000</b>	Dinas Perindustrian,
3	31	04	2.01		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										<b>200,000,000</b>						<b>200,000,000</b>	Dinas Perindustrian,
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SII Nas	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SII Nas	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas		1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.2 %	1 Dokumen	0.2 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	peleku usaha	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	0.2 %	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
<b>TOTAL</b>															<b>140,606,106,299</b>						<b>106,513,711,243</b>	

## **BAB V PENUTUP**

---

### **5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja**

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut merupakan dokumen yang menjabarkan program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut tahun 2019-2024.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan forum Perangkat Daerah dibawah lingkup Bappeda agar program / kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor, maka catatan penting yang perlu mendapat perhatian bahwa dalam program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja ini sangat tergantung pada ketersediaan Anggaran, sehingga perlu disusun prioritas program dan kegiatan bila seandainya jumlah anggaran yang tersedia tidak memadai dan untuk pelaksanaannya semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk/kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

### **5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk penyelenggaraan satu tahun ke depan. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam membangun

daerah dan pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis periode tahun 2019-2024, RPJMD periode tahun 2019-2024 dan RKPD tahun 2023. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Renja Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
- b. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, maka dalam rangka koordinasi perencanaan perlu dibuat Renja Tahun 2023 sebagai berikut :
  1. Dalam membuat Renja wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum SKPD, konsultasi public, dengan pendapat public (public hearing) atau Forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
  2. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenang;
- c. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- d. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan –peraturan lainnya.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

- a. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan;
- b. Merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Kabupaten Garut;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam melaksanakan program dan kegiatan serta koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna, berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat;
- d. Menjadikan hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang disusun di dalam Laporan Kinerja (LAPKIN) setiap berakhirnya tahun penyelenggaraan sebagai bahan acuan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dimasa mendatang sesuai dengan sasaran sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik untuk tahun berikutnya.

Demikian semoga Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Garut.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**